

Landreform Hindarkan Jebakan Pangan

Jakarta, Kompas (Jumat, 2 November 2001)

Indonesia bisa jatuh pada jebakan pangan, yang berarti sangat tergantung pada impor pangan, sehingga tidak bebas menentukan kebijakan pangan nasional. Untuk itu Indonesia harus segera melakukan *landreform* dan pemberdayaan, membuat kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, serta mengembangkan teknologi pertanian dan pengolahan pangan. Hal ini mengemuka dalam diskusi panel "Kebijakan Pangan untuk Menangkal Jebakan Pangan" yang diselenggarakan Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi bersama Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia, Kamis (1/11).

Menurut Prof Dr Eriyatno dari *Center for System Sciences and Development*, Indonesia dengan penduduk lebih 200 juta merupakan pasar konsumen terbesar setelah Cina, India dan AS. Sehingga Indonesia menjadi target utama pemasaran negara maju dan perusahaan multinasional.

"Saat ini Indonesia sudah terjebak dalam jerat utang dan tak jelas kapan bisa bebas. Perlu diwaspadai pula kecenderungan untuk masuk dalam jebakan pangan. Data Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tepung terigu menempati urutan ke enam dari 10 komoditas impor terbesar. Data Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), tahun lalu impor enam komoditas pangan mencapai Rp 11,8trilyun," paparnya.

"Masyarakat luas makin terbiasa dengan mi dan bakso yang berbahan baku gandum, tahu dan tempe dari kedelai impor Belum lagi golongan menengah atas dengan produk susu, daging, gula, beras, jagung, dan buah impor," tambah Eriyatno.

Guru besar IPB, Prof Dr Sediono MP Tjondronegoro menyatakan, penduduk Jawa sejak abad 19 sudah mengalami kekurangan pangan. Pertambahan penduduk tidak seimbang dengan pertambahan areal sawah. Revolusi hijau hanya mampu membuat Indonesia swasembada beras selama dua-tiga tahun, memperpuruk petani miskin dan akhirnya impor beras lagi Hal ini diperburuk dengan besarnya konversi areal sawan untuk perluasan prasarana, industri dan permukiman.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Prof Dr Dedi Fardiaz masyarakat mengalami demam global, menganggap produk pangan impor superior dan lebih bergengsi. Remaja dan anak menjadi target utama serangan produk impor dengan maraknya restoran siap saji dan waralaba berbau asing.

Di sisi lain, penolakan sejumlah produk ekspor Indonesia di luar negeri menimbulkan citra buruk produk pertanian kita, sehingga makin sulit bersaing di aalam maupun di luar negeri.

Ketergantungan pangan sering kafi dimulai lewat bantuan kemanusiaan yang sekaligus berfungsi sebagai uji coba pasar dan pembelajaran konsumen terhadap produk bersangkutan misalnya susu untuk anak sekolah yang bahan bakunya tidak dimiliki Indonesia. Maraknya bisnis ritel ikut andil meningkatkan pemasaran produk pangan impor.

Kurang percayadiri

Menurut Rektor IPB Prof.Dr.M. Aman Wirakartakusumah, masalah mendasar adalah kurangnya kepercayaan diri sebagai bangsa. Selain juga kurangnya pemberdayaan para pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi dan pemasaran pangan.

Aman berpendapat, perlu perubahan paradigma dalam memandang pangan. Tidak sekadar untuk perut tapi juga untuk kualitas hidup dan kesehatan, tidak memfokuskan beras sebagai makanan pokok tapi melakukan diversifikasi, tidak hanya memproduksi bahan baku tapi melakukan proses pada bahan pangan sehingga mendapat nilai tambah.

Ditambahkan, Indonesia juga perlu memperhatikan, produk pangannya tidak hanya untuk pasar domestik tapi juga untuk pasar global. Selain perlu peningkatan mutu pangan dan rasa percaya diri sebagai bangsa untuk mampu bersaing.

Ir Usman Hasan dari HKTI menyatakan, impor bukan hal buruk Tapi jika dilakukan dengan bea masuk sangat ringan, sehingga harganya sangat murah misalnya beras akan menurunkan gairah petani untuk menanam padi. Sehingga makin mendorong ketergantungan pangan. Seharusnya pemerintah mengenakan bea masuk cukup besar, sehingga beras petani bisa bersaing.

Menurut Dr Bustanul Arifin dari Indef, selama kampanye cinta makanan Indonesia tidak dikaitkan dengan pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan pangan serta diintegrasikan dalam kebijakan pangan nasional, tidak akan ada hasilnya untuk ketahanan pangan.

Aman mengusulkan dilakukan upaya simultan pengembangan teknologi, kampanye pangan tradisional serta adanya kebijakan politik untuk melindungi produksi pangan nasional.

Franky Welirang dari PT Bogasari Flour Mills juga menyatakan perlunya dikembangkan teknologi agar benih tidak perlu impor lagi. Perlu juga dikembangkan teknologi pengolahan pangan tepat guna untuk pedesaan. Perlu ada diversifikasi pangan, sehingga tidak tergantung pada satu bahan pangan. Kini pihaknya berupaya membuat tepung dari umbi-umbian agar lebih tahan lama dan penggunaan lebih luas.

Sediono menekankan perlunya *landreform* menyediakan tanah untuk digarap, memberdayakan orang yang menggarap serta ada modal

untuk menggarap, baru bisa mandiri pangan

Eriyatno dan **Dedi** berpendapat, semua pihak, baik pemerintah, produsen maupun masyarakat, perlu mendayagunakan semua sumber daya untuk menyaingi produk pangan impor, baik dari segi ketersediaan mutu dan keamanan maupun prestisenya. Perlu ada kampanye untuk meningkatkan kebanggaan akan pangan lokal. Selain itu dilakukan riset dan teknologi untuk meningkatkan mutu, prestise dan keamanan pangan, (atk)